



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA
SUB UNIT KERJA : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERWAN AGUS PURWANTO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 644265

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/45 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 230 m² di BANTUL, WARISAN Rp. 57.500.000
3. Tanah Seluas 607 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 507.000.000
4. Tanah Seluas 806 m² di BANTUL, WARISAN Rp. 185.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/170 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 32 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 398.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 495.820.117**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 3.243.820.117



III. HUTANG

Rp. 800.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.443.820.117

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.